



DPRD KOTA YOGYAKARTA
 SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

PERLU DITINDAKLANJUTI PERDA DI KOTA YOGYA

UU TPKS Harapan bagi Kaum Perempuan

YOGYA (KR) - Momentum Hari Kartini pada tahun ini semakin istimewa dengan disahkannya Undang-undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). UU tersebut menjadi harapan bagi kaum perempuan dan anak Indonesia terkait perlindungan hukum atas diskriminasi dan hak yang dirampas terhadap tindak pelecehan.

Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta Dhian Novitasari, mengungkapkan dengan hadirnya UU TPKS maka aparat penegak hukum memiliki legal standing dalam melakukan tindakan jika ada aduan maupun indikasi terhadap korban kekerasan. "Aparat bisa langsung melakukan proses penyidikan dan penegakan hukum," tandasnya.

Di samping itu, anggota Fraksi Partai Gerindra ini mengemukakan, dalam UU tersebut juga memuat terkait *victim trust fund* atau dana bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual. Hal tersebut merupakan bentuk hadirnya negara terhadap korban agar mendapatkan perlindungan hukum yang

Dhian Novitasari SPd
Wakil Ketua DPRD
Fraksi Gerindra



KR-Istimewa

sing ialah pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, kekerasan seksual berbasis elektronik, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual dan perbudakan seksual. "Dengan adanya UU ini artinya ke depan bagaimana kita perempuan dan anak di wilayah hukum Indonesia benar-benar merasa memiliki hak, mendapatkan keadilan, pemulihan dan perlindungan," harapnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap di wilayah hukum Kota Yogya juga membuat kearifan lokal semacam perda terkait perlindungan tindak kekerasan dan pelecehan pada perempuan dan anak. Khususnya payung hukum untuk anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan non fisik. Apalagi maraknya kekerasan anak saat ini karena semakin terbuka informasi serta pengaruh media sosial yang gampang diakses anak-anak usia labil dan belum bisa memilah hal-hal yang merugikan antar sesama. **(Dhi-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005